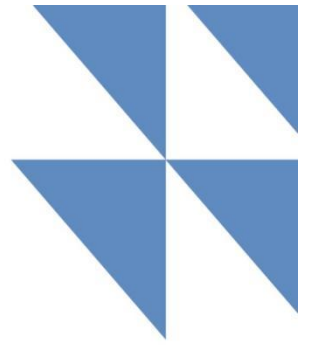
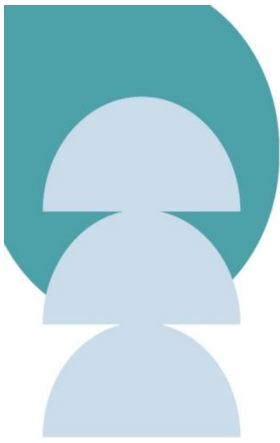




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai tindak lanjut amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu menyusun Renstra 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangan. Namun demikian kami berharap semua kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran secara jelas akan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Lebih jauh lagi, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara utuh pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Probolinggo, 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD	9
2. Sumber Daya PD.....	20
3. Kinerja Pelayanan PD	22
4. Kelompok Sasaran Layanan	24
5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Dearah	37
6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	38
7. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
BAB III TUJUAN ,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	43
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	44
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	45
3. Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	46
4. Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	47
BAB IV PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB V PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

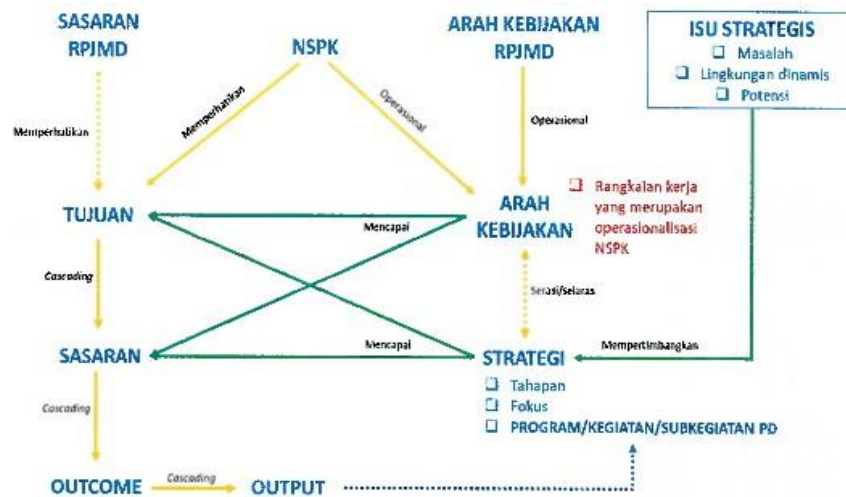
Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (result oriented) yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029. Perencanaan ini memperhitungkan potensi- potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman , Penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD , Provinsi, / Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan Pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek Pembangunan, Perencanaan, Pelayanan Publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian Integral dan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD dan RENSTRA PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan dimaksud bermaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah terpilih sekaligus merupakan bagian dan upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Winns) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan dokumen perencanaan yang lain dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra menurut Inmendagri
Nomor 2 Tahun 2025



Sumber : Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

Selain beberapa hal diatas dalam suatu Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga harus memperhatikan kesetaraan gender (Pengarustamaan Gender) dan SAKIP pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah proses untuk perempuan, laki-laki, dan anak agar mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan Keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan Pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional), Kesetaraan Gender dalam kebijakan Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu perangkat Daerah untuk berkembang , mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi aspirasi gender dalam proses perencanaan Pembangunan, maka semakin besar Upaya suatu perangkat daerah untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaiknya rendahnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan Instrumen pertanggungjawaban, maka Renstra merupakan Langkah

awal dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo. Dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan pada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo perlu Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan — peraturan terkait dengan dokumen Perencanaan Pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia anomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
- c. Peraturan Pemrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402) ;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136) ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 ;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 46) ;

- m. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46) ;
- n. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9) ;
- o. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9) ;
- p. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- q. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
- r. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
- s. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- t. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustria dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 memiliki maksud agar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) Tahun , khususnya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 .

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja :

- a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Tenaga Kerja dan Urusan Perindustrian selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung Visi dan Misi Wali kota Probolinggo.
- b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Pembangunan Urusan Perindustrian dan Urusan Tenaga Kerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama periode tahun 2025-2029.
- c) Menyediakan pelaksanaan program, dan kegiatan dinas dengan prioritas Pembangunan Daerah serta kebutuhan Masyarakat di Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selama periode tahun 2025-2029;
- d) Memberikan Pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .
- e). Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra

- 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5. Mitra PD dalam pembinaan pelayanan (jika ada)
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Jika ada)
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada)
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subbagian beserta Kinerja , Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ;
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program, Prioritas Pembangunan Daerah ;
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah ;

- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

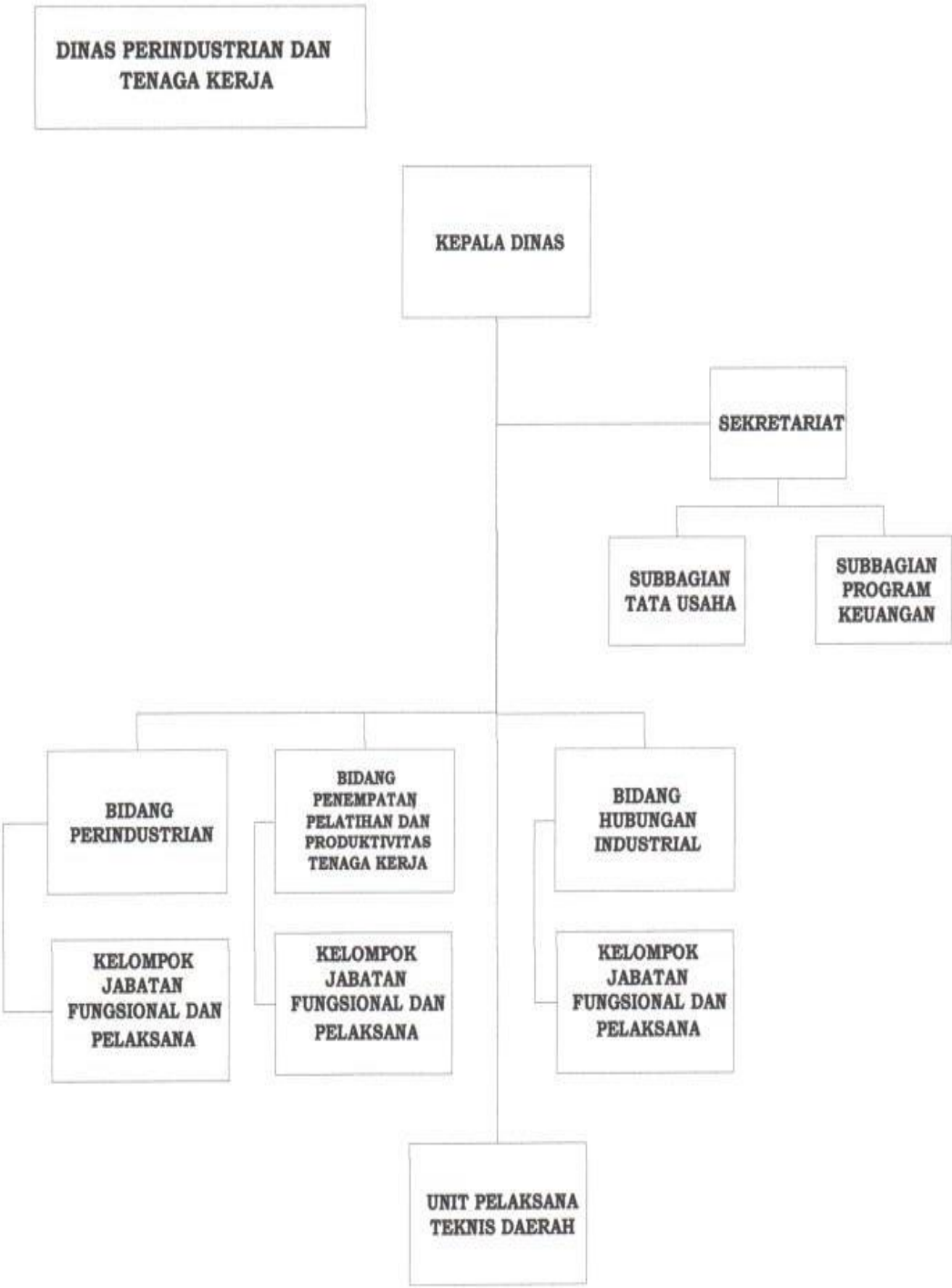
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Adapun uraian tugas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah;
4. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1 Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai;
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
8. Pemindahan Tugas ASN;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
12. Pengoordinasian pelaksanaan Analis Jabatan, Analis, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.

- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga;
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Penyediaan Bahan/Material;
 - 8. Fasilitas Kunjungan Tamu, terdiri atas kehumasan dan protokol;
 - 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - 12. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja; dan
 - 13. Pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi;
 - 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD;
 - 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pengadaan alat besar;
 4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
 5. Pengadaan mebel;
 6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 7. Pengadaan aset tetap lainnya;
 8. Pengadaan aset tak berwujud;
 9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 4. Pemeliharaan Mebel;
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 9. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.2 Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 2. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 4. koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 5. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 7. evaluasi kinerja SKPD
 8. pelaksanaan akuntabilitas
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD, dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah, meliputi:
 1. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 2. Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
 3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 4. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)

5. Pengelolaan data retribusi daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6. Penetapan wajib retribusi daerah (Sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran), dan
7. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah

2. Bidang perindustrian

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri, meliputi :
 1. Penyusunan rencana pembangunan industri
 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri
 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan daran dan prasarana industri
 5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta ,masyarakat, dan
 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
 - b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPHI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan, meliputi:
 1. Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kota dalam sistem informasi industri nasional (siinas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang indutri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah
 - c. Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan daerah, meliputi:
 1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data

kawasan industri serta data lain lingkup kota melalui sistem informasi industri nasional (siinas)

2. Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kota melalui siinas, dan
3. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kota dalam penyampaian data ke siinas.

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas di Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja serta, perencanaan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), yang meliputi :
 1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro, dan
 2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
 - b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - c. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, yang meliputi : pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, yang meliputi: penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi
 - e. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, yang meliputi : pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
 - f. Pengukuran produktivitas tingkat daerah, yang meliputi : pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 - g. Pelayanan antar kerja di daerah, yang meliputi :
 1. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
 2. Pelayanan antar kerja
 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 4. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dan
 5. Perluasan kesempatan kerja
 - h. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi, dan

2. Pengawasan dan pengenalan LPTKS
- i. Pengelolaan informasi pasar kerja, yang meliputi :
 1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
 2. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dan
 3. Job fair/bursa kerja
- j. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah, yang meliputi:
 1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 2. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dan
 3. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- k. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi : koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah
- l. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, yang meliputi :
 1. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan
 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi, dan
 4. Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- m. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 1. Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi
 3. Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi
 4. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 5. Penyuluhan transmigrasi
 6. Pelatihan transmigrasi
 7. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi
 8. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk setempat
 9. Perpajakan ke calon lokasi penempatan transmigran
 10. Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk asal

11. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi calon transmigran penduduk asal
12. Fasilitas pelatihan calon transmigran
13. Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik)
14. Pengangkutan dari desa ke desa
15. Penampungan kota
16. Cek kesehatan calon transmigran
17. Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan
18. Pendampingan dari kota sampai ke lokasi
19. Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku), dan
20. Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi
- n. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (kawasan transmigrasi), yang meliputi :
 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman, dan
 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

4. Bidang Hubungan Industrial

1. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas di bidang hubungan industrial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan industrial mempunyai fungsi:
 - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah, meliputi :
 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
 2. Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan, dan
 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, meliputi:
 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan

penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah

3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
4. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah, dan
5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana
3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

2.1.2 Sumberdaya PD

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut :

a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berjumlah 66 orang terdiri dari :

JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	32	0	0	10	43
Perempuan	18	0	0	6	22
Jumlah	50	0	0	16	66

b. Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
1.	S2	13	-	-	-	13
2.	S1	22	-	-	2	24
3.	Sarjana Muda / DIII	2	-	-	1	3
4.	SLTA	13	-	-	11	23
5.	SLTP	-	-	-	1	1
6.	SD	-	-	-	1	1
Jumlah		50	-	-	16	66

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO	DIKLAT PIMPINAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklat Pimpinan II	1 orang
2.	Diklat Pimpinan III	3 orang
3.	Diklat Pimpinan IV	3 orang
Jumlah		7 orang

d. Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Satuan
		NAKER
1.	Tempat Parkir Roda Dua	2
2.	Tempat Parkir Roda Empat	-
3.	Ruang Pertemuan	2
4.	Ruang Customer Service	1
5.	Ruang arsip	1
6.	Ruang Musholla	2
7.	Gudang	2
8.	Paving Halaman	2
9.	Pagar Gedung	6
10.	Taman Kantor	1
11.	Meja Kerja	58
12.	Kursi Kerja	176
13.	Kursi Rapat	56
14.	Lemari Arsip	15
15.	Podium	-
16.	Almari Buku/Kayu	9
17.	Lemari Kaca	-
18.	Tangga Alumunium	-
19.	Komputer PC	4
20.	Laptop	17
21.	Printer	12
22.	Kulkas	2
23.	Filing Cabinet	9
24.	AC	9
25.	Exhause Fan	-
26.	Sofa	2
27.	Sofa Laktasi	-
28.	Kursi Tamu	5
29.	Televisi	7
30.	Kendaraan Roda 2	12
31.	Kendaraan Roda 4	2

32.	Acces Point	-
33.	Apar	-
34.	Brankas	2
35.	Camera Digital	2
36.	Camera + Attachment	1
37.	CCTV	9
38.	Dispenser	1
39.	Harddisk	2
40.	Layar LCD Projector	2
41.	Mesin Fax	1
42.	Gorden	27
43.	Genset	-
44.	Sound System	1
45.	Mic Wireles	-
46.	PABX	-
47.	Scanner	-
48.	Sever Komputer	1
49.	Mesin Ketik	1
50.	Lemari Besi	1
51.	Penghancur Kertas	-
52.	Audio Aplifier	-
53.	Bak Sampah Berroda	1

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
															Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri				50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	50M	0,00%	49.971.274.939	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal				78,30%	83,30%	88,30%	93,30%	93,30%	78,30%	83,30%	88,30%	93,30%	93.3%	100	100	100	100	100
	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Anjuran dan Perjanjian Bersama				60%	77,20%	82,20%	87,20%	87,20%	77,20%	82,20%	87,20%	92,20%	0	100	100	100	105,73	105,73
	Persentase Kepesertaan Jamsostek				50%	64,50%	69,50%	74,50%	74,50%	64,50%	69,50%	74,50%		0	100	100			
	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja							70%	70%					130%					
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial							56%	56%					19%					

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kota Probolinggo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2020																	
Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian Dan Pariwisata	133.399.480					126.808.250					95,06						
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	50.000.000,00					66.447.500,00					132,90						
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	66.450.000,00					83.323.000,00					125,39						
Penempatan dan Perluasan Kerja	209.045.400					207.278.500					99,15						
Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	158.009.300					155.007.400					98,10						
Balai Latihan Kerja	95.631.900					95.272.700					99,62						

Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	81.446.900					80.313.900					98,61						
Fasilitas Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial	29.300.150					26.735.450					91,25						
2021																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		172.751.000					172.713.818,00					99,98					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		191.209.200					130.448.450,00					68,22					
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1.600.000					1.600.000,00					100,00					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		14.874.000					11.361.000,00					76,38					
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		30.600.000,00					27.093.450,00					88,54					

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatin Keterampilahan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		806.323.700					770.477.280					95,55					
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta dan Pra Lembaga Pelatin Kerja		89.367.820					83.405.015					93,33					
Pelayanan antar Kerja		158.440.500					153.491.600					96,88					
Job Fair/Bursa Kerja		101.129.000					101.025.000					99,90					
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		9.075.000					9.022.000					99,42					
Pengesan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		35.390.000					35.310.000					99,77					
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupan		43.577.500					38.977.500					89,44					
pencegahan Perselisin Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		73.280.500					70.549.860					96,27					

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanpada Organisasi PengUsaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		50.000.000					50.000.000					100,00					
2022																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			194.641.800,00				365.890.370,00						187,98				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			108.025.800,00				0						0,00				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			108.025.800,00				107.709.620,00						99,71				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			299.999.800,00				486.179.161,00						162,06				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			3.589.465.000,00				2.437.639.163,00						67,91				
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1.999.900,00				3.599.800,00						180,00				

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			21.026.000,00					34.913.500,00					166,05				
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			39.449.900,00					68.177.970,00					172,82				
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			3.419.187.850,00					2.016.543.501,00					58,98				
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			94.508.610,00					93.073.806,00					98,48				
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																	
2023																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				35.000.000,00													

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				106.384.000,00													
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				175.385.700,00													
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.000.000,00													
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1.500.000,00													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				10.000.000,00													
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				35.730.300,00													
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				133.038.300,00													

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				201.138.520,00													
Pelayanan antar Kerja				27.750.000,00													
Perluasan Kesempatan Kerja				58.936.500,00													
Job Fair/Bursa Kerja				9.075.000,00													
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				2.910.000,00													
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				39.999.800,00													
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				110.570.000,00													
2024																	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					91.658.800					97,86							

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					103.102.700					95,00							
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					8.837.980					91,56							
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1.500.000					100							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					7.750.000					91,48							
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					33.065.400					91,19							
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					3.632.348.079					89,53							

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					169.085.520					91,08							
Perluasan Kesempatan Kerja					86.686.500					99,65							
Job Fair/Bursa Kerja					11.985.000					99,67							
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					18.099.800					95,89							
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					81.075.800					99,09							

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang mempunyai tugas dan fungsi tantangan sebagai berikut :

No.	Urusan	Sasaran Layanan	Peluang
1.	Perindustrian	Pelaku Usaha	• Rekomendasi Izin • Pelaporan Usaha • Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merk dan Halal, Sertifikasi TKDN
2.	Ketenagakerjaan	• Perusahaan • Lembaga Pelatihan Kerja • Pelaku Usaha	• Fasilitasi Pembinaan HI bagi Perusahaan • Pelaporan PHK • Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI • Penerbitan SK pengesahan PP pendaftaran PKB, Pencatatan PKWT, SP/SB dan LKS Bipartit • Pelaksanaan Job Fair • Kerjasama tenaga Kerja Instruktur • Bantuan Usaha pada peserta pelatihan yang mempunyai sertifikat

2.1.5. Mitra PD dalam pemberian Pelayanan

Urusan Perindustrian

1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Peran dan Kolaborasi
1.	Bapperinda	Sinkronisasi program perindustrian dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD)
2.	DKUP	Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), fasilitasi pembiayaan dan
		Dukungan akses pasar, promosi produk industri lokal
3.	Dinas PUPR	Pengembangan infrastruktur kawasan industri
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan limbah industri, izin lingkungan

2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

No	Lembaga	Peran
1	Kementerian Perindustrian	Kebijakan nasional sektor industri, bantuan teknis dan pengembangan IKM
2	Kementerian Tenaga Kerja	Pelatihan berbasis industri dan sertifikasi

3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

No	Mitra	Peran
1	Asosiasi Industri (API, KADIN, HIPMI, dll.)	Kemitraan usaha, input kebijakan, promosi

URUSAN TENAGA KERJA

MITRA PERANGKAT DAERAH

1. Perangkat Daerah Internal Pemerintah Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Peran dan Kolaborasi
1	Bapperinda	Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan tahunan ketenagakerjaan
2	Dinas Pendidikan	Sinkronisasi antara lulusan vokasi dan kebutuhan pasar kerja
3	Dkup	Pengembangan wirausaha tenaga kerja lokal
4	Dinas Sosial dan DP3A	Pendampingan tenaga kerja rentan dan penyandang disabilitas dan Perlindungan Tenaga kerja Perempuan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Validasi data pencari kerja dan tenaga kerja lokal
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Perda terkait ketenagakerjaan (izin LPK, pelanggaran normatif, dll.)

2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat

No	Instansi	Peran
1	Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI)	Kebijakan nasional, bantuan teknis, sertifikasi kompetensi
3	BNP2TKI / BP2MI	Penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia
4	BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)	Sertifikasi kompetensi kerja dan LSP

3. Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

No	Mitra	Peran
1	BLK Komunitas dan Swasta	Penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi
2	Perusahaan dan Dunia Usaha/Industri (DU/DI)	Penempatan kerja, magang, link and match SDM
3	Asosiasi Profesi dan Dunia Usaha (KADIN, APINDO, HIPMI, dll.)	Penyusunan SKKNI, masukan kebijakan ketenagakerjaan
4	Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi	Pengembangan SDM, penelitian pasar kerja
5	Lembaga Keuangan (Bank/Non-bank)	Dukungan pembiayaan program kewirausahaan tenaga kerja
6	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Perlindungan hak-hak pekerja dan mediasi hubungan industrial
7	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Advokasi tenaga kerja rentan dan pendidikan ketenagakerjaan
8	Media Lokal	Sosialisasi dan penyebaran informasi pasar kerja

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja PD

Untuk Dinas Perindustrian dalam pencapaian kinerja Adalah BPJS

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab PD

Dinas Perindustrian bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan dalam hal ini melayani pembayaran bagi Tenaga rentan (Petani, Nelayan dan UMKM)

2.2. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor – Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mampu dua urusan yaitu urusan Industri dan Urusan Tenaga Kerja maka secara umum pelayanan di Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja, permasalahan sebagai berikut :

Urusan Industri

1. Masih kurangnya ketrampilan teknis produksi pelaku usaha industri
2. Keterbatasan kemampuan industri untuk memenuhi sertifikat HKI dan standarisasi

Urusan Tenaga kerja

1. Kualifikasi pencari kerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Perusahaan.
2. Belum optimalnya Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja dan penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

2.2.2. ISU STRATEGIS

Isu-isu Strategis adalah Kondisi atau Hal yang diperhatikan dalam perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Analisa Isu - isu Strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja dalam menjalankan Pemerintahan ada berbagai permasalahan.

Untuk merumuskan Isu Startegis Perangkat Daerah dapat di jabarkan dalam table 2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.1
ISU STRATEGIS

Tabel 2.1
Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Tenaga Kerja					
Mediasi dan Fasilitasi	1. masih adanya pengaduan kasus perselisihan hubungan industrial	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Isu global dalam tenaga kerja mencakup berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi dunia kerja di seluruh dunia, mulai dari globalisasi dan perubahan teknologi hingga kesenjangan keterampilan dan migrasi tenaga kerja. Isu-isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program program	1. optimalisasi peningkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melaporkan perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban JamSostek	2.Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program jamsostek			Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penopang utama peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.		2. Belum optimalnya perusahaan yang patuh terhadap kepesertaan jamsostek

Memberikan pelatihan kerja berbasis Kompetensi	3. jumlah lulusan sekolah tidak sebanding dengan lowongan kerja dan kesempatan kerja yang ada			Program ini tak hanya mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, namun juga infrastruktur digital untuk memajukan industri kreatif dan kewirausahaan. Selain itu, peran aktif koperasi di sektor agromaritim ditingkatkan guna memaksimalkan potensi hasil bumi dan perikanan, agar mampu berkompetisi di pasar domestik maupun internasional. Keseluruhannya ditujukan untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Infrastruktur pelabuhan menjadi kunci vital karena berfungsi sebagai penghubung perdagangan hasil laut dan komoditas lain ke wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Tembaga, modernisasi sistem bongkar muat, serta penataan akses jalan kota akan	ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, sehingga yang memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang Secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi Jawa Timur yang meningkat 1,5 persen tahun 2024 pada kondisi perekonomian dunia	3. optimalisasi pelatihan berbasis unit kompetensi dan pembekalan wirausaha baru
Mengadakan Job Fair	4. Kapasitas peserta sosialisasi/pembinaan yang di laksanakan DISPERINAKER kurang maksimal					4. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja
	5. masih adanya pengaduan kasus perselisihan hubungan industrial					5. Optimalisasi peningkatan penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

				memudahkan distribusi barang dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Pemerintah kota juga dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif lokal dengan ruang pameran, event seni-budaya, serta dukungan digital marketing. Sedangkan koperasi nelayan dan petani berperan strategis dalam memaksimalkan hasil perikanan dan pertanian perkotaan, sejalan dengan agenda agromaritim industri yang diusung Asta Cita ketiga.	yang dinamis juga belum dapat menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. Dibutuhkan upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat. lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah.	
	Urusan Perindustrian					

1. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Probolinggo	1. Masih rendahnya daya saing dan nilai tambah produksi	1. Keterbatasan Infrastruktur Industri dalam pengolahan limbah dan suplai energi	1. isu global dalam perindustrian sangat beragam, mulai dari isu lingkungan seperti pemanasan global dan transisi energi, hingga isu ekonomi seperti persaingan global dan rantai pasokan. Selain itu, ada juga isu terkait keberlanjutan, teknologi, dan regulasi yang memengaruhi industri di seluruh dunia.	1. Pemerintah Indonesia mendorong penguatan industri hijau sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon menuju industri ramah lingkungan	1. Penguatan Kawasan Peruntukan Industri Berbasis Potensi Daerah pengolahan hasil laut dan agroindustri	1. Rendahnya Daya Saing dan Produktivitas Industri Lokal yang ramah lingkungan
2. Pertumbuhan nilai produksi relatif stabil	2. Masih kurangnya kualitas SDM Industri	2. Rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku industri dalam menerapkan prinsip green industry , efisiensi energi, dan pengelolaan limbah industri	2. Tuntutan Sertifikasi dan Standar Internasional untuk produk industri ekspor	2. Pemerintah pusat mendorong Making Indonesia 4.0 , namun banyak industri kecil belum siap bertransformasi digital.	2. Pengendalian Pencemaran dari Aktivitas Industri dan masih rendahnya penerapan produksi bersih	2. Sektor Industri Belum Menjadi Sektor Basis Ekonomi
3. Kinerja produksi dan nilai tambah menunjukkan pertumbuhan positif	3. Masih kurangnya branding produk dan sertifikasi standar produk				3. Kegiatan usaha industri rentan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karena itu rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan diatas, ditentukan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan ketiga Urusan, Tenaga Kerja, Perindustrian

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI RPJMD 2025-2029 "Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif."			
MISI RPJMD 1. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan" 2. Ekonomi Inklusi Berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital			
TUJUAN RPJMD Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan		TUJUAN RPJMD Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	
TUJUAN RENSTRA: Tenaga Kerja yang Kompeten yang Berdaya Saing serta Peningkatan Produktivitas Sektor Industri			
SASARAN RPJMD "Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing		SASARAN RPJMD Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	
SASARAN RENSTRA Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		SASARAN RENSTRA Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	SASARAN RENSTRA Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Indikator 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Indikator 2 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Indikator 3 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Indikator 4 Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pemahaman mengenai kerangka kinerja Pembangunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menggunakan mulai tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami mulai tabel berikut :

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Visi : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh,Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif			
Misi II : Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan			
Tujuan Kota	Sasaran Kota	Strategi Kota	Arah Kebijakan Kota
Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian dan Kebudayaan	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Demand Driven Ketenagakerjaan	1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal dengan Dunia Usaha di dukung perluasan akses Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja 2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Misi III : Ekonomi Inklusi Berbasis Potensi Lokal Daerah yang Mendukung Integrasi Ekonomi Digital			
Tujuan Kota	Sasaran Kota	Strategi Kota	Arah Kebijakan Kota
Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas dan Kolaborasi	Penguatan Indsutri Kecil Menengah (IKM) yang didukung Peningkatan Ekosistem Industrialisasi

CASCADING

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

' MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF "

1. AKSELERASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2. EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL DAERAH YANG DIDUKUNG INTEGRASI EKONOMI DIGITAL

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SERTA PELESTARIAN KEBUDAYAAN
2. AKSELERASI PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS ESKTORAL

1. TENAGA KERJA YANG KOMPOTEN DAN BERDAYA SAING
2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI

TENAGA KERJA YANG KOMPOTEN DAN BERDAYA SAING SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI

Indikator : 1. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

1. MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Indikator : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Cakupan kepesertaan Jaminana Sosial Ketegakerjaa
2. MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI
Indikator : Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri
3. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUTABEL
Indikator : Nilai Sakip (Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

**VISI
RPJMD**

**MISI 2 DAN
MISI 3
RPJMD**

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

**TUJUAN IKU
DISPERINAKER**

**SASARAN IKU
DISPERINAKER**

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR

Urusan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

Indikator : Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya

Kegiatan :

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi

Indikator : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sub Kegiatan

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangkai optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator : Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Indikator :Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Makro

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator :Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Makro

Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri

1. **Kegiatan :**Pelayanan antar kerja di daerah Kab/kota

Indikator : Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja

Sub Kegiatan

1. **Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan**

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD

2. **Perluasan Kesempatan Kerja**

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

- 2 **Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas informasi pasar kerja

Sub Kegiatan

JOB FAIR/ Bursa Kerja

Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

Program Hubungan Industrial

Indikator : Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial

1. **Kegiatan :** Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota

Indikator : Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan

Indikator : Jumlah data dan informasi sarana HI

(PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta dan Sostek serta pengupahan

2. **Kegiatan :** Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Prosentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Indikator : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

Urusan Perindustrian

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Indikator : Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan
Sub Kegiatan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Indikator : Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan
Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator : Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional)
Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3.3. STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategis adalah cara yang di tempuh dalam rangka pencapaian misi, strategis diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan Pembangunan Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah menetapkan strategis untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSPK : Penguatan sistem Demand Driven Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang berkompeten dan berdaya saing serta peningkatan Produktifitas Sektor Industri	1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA)	71,01	71,05	71,09	71,13	71,17	71,21	
Sasaran : Tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing			2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	62,52	64,45	66,32	68,19	70,06	71,93	
NSPK : Peningkatan daya saing sektor unggulan daerah melalui modernisasi sistem serta penguatan konetivitas dan kolaborasi		2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi sektor Industri	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	
Sasaran : Peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor unggulan daerah										
Sekretariat		3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah) Disperinnaker	76,69	76,75	76,80	76,85	76,90	76,95	

Adapun Pentahapan Pembangunan adalah Perioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian dan sasaran Perangkat Daerah, Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dapat di sajikan seperti pada table dibawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Instruktur Dasar Perkotaandan Instruktur Ekonomi untuk mengungkit Pemerrataan Kesejahteraan	Mendorong Pengembangan dan Penyebarluasan Inovasi untuk Modernisasi Sektor-sektor Strategis Daerah	Akselarasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Inklusif menuju masyarakat Tangguh dan Sejahtera	Memantapkan Kota Probolinggo yang sejaterah, Mandiri, dan Inklusif sebagai Pondasi menuju Kota Logistik, Tangguh, dan Berkelanjutan
- Peningkatan Kesenjangan Sosial untuk menjamin stabilitas keamanan . ketentrman,ketertiban Umum wilayah - Pemerataan layanan sosial sosial dara yang berkualitas - Pembangunan mental wirausaha generasi muda sebagai potensi Ekonomi Inklusif - Perluasan cakupan perlindungan social untuk mengurangi kesenjangan - Pengembangan kapasitas SDM Pemerintahan untuk peningkatan Tata Krelola Pemerintahan. - Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	- Penguatan kodusitas wilayah untuk peningkatan rasa aman, dan stabilitas ekonomi; - Percepatan pemerataan sarana prasaran Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan lingkungan layak. - Optimalisasi Pembangunan industry penunjang konektivitas berbasis afirmasi wilayah dan berwawasan lingkungan. - Pemberdayaan social Alformatif pada Perempuan disabilitas, serta Masyarakat rentan dan miskin - Perluasan Perapan sistem merit dan peningkatan Akuntabilitas Birokrasi. - Optimalisasi investasi produktif dan Kerjasama untuk perluasan kesempatan kerja.	- Peningkatan partisipasi bermakna Masyarakat rentan dan miskin dalam Pembangunan social. - Digitalisasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan kualitas sarana perumahan dan lingkungan layak. - Modernisasi instruktur Ekonomi strategis terutama sektor perdagangan dan Industri pengolahan. - Penguatan Afiriasi ekonpmi pada kelompok rentan untuk menurunkan kesenjangan. - Perluasan pemanfaatan Inovasi yang mengungkit pada pelayanan publik berkualitas. - Pengkatan Produktivitas tenaga kerja dan Daya Tarik Investasi.	- Optimalisasi pencapaian inklusi Sosial pengarusutamaan gender dan penghambatan pada haka nak dan difabel; - Pengembangan inovasi berbasis Teknologi informasi untuk peningkatan Mutu dan akses Pendidikan serta Kesehatan. - Peningkatan Nilai tambah sektor Kelautan dan Perikanan serta penguatan Kawasan perdagangan Strategis. - Perluasan akses produksi dan pengembangan kapasitas Usaha kelompok Masyarakat rentan. - Percepatan trsnformasi Tata Kelola Pemerintahan yng akuntabel melalui pemanfaatan Data yang optmal dan birokrasi digital.	- Pemanfaatan partisipasi masyarakat Sipil yang Tangguh pada aktivitas social Ekonomi. - Penguatan system layanan , Kesehtan dan Pendidikan yang modern dan inklusif. - Peneguhan ekosistem Ekonomi yang memperkuat Efisiensi Distribusi batrang dan jasa Berskala Nasional dan Internasional. - Perluasan Ekonomi Huiau dan Ekonomi Biru yang menyasar Industri kecil dan Usaha Padat Karya. - Perluasan Kemintraan Strategis Pemerintah dan Tranformasi Digital. - Pemantapan ketahanan Daerah Melalui Tata Kelola Pembangunan Ramah LingkungN.

			- Penguatan ekosistem Investasi dan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja.	
--	--	--	---	--

3..4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Krerja

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi Untuk menjaga konsistensi tujuan , terutama dalam menjabarkanya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah menetapkan kebijakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1		Urusan Tenaga Kerja		
	Memberikan pedoman untuk berbagi urusan ketenagakerjaan, hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja dan penempatan kerja	1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal dengan dunia usaha didukung perluasan akses informasi Pasar kerja dan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja	1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja serta Perluasan akses penempatan melalui kerjasama dengan dunia Usaha dan Mandiri	
	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkait dengan ketenagakerjaan	2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja		
2		Urusan Perindustrian		
	Menetapkan standar kualitas produk yang harus dipenuhi oleh industri	1. Penguatan Industri Kecil Mengah (IKM) yang disukung peningkatan Ekosistem Industrialisasi	1. Penguatan struktur industri lokal melalui pembinaan dan pengembangan IKM unggulan berbasis potensi daerah yang ramah lingkungan	

berdasarkan tujuan,sasaran,strategi dan arah kebijakan yang telah disampaikan berikut merupakan bagan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKota Probolinggo tahun 2025-2029 yang dapat dibuat data pendukung untuk penentuan Rencana Program dan kegiatan antara lain:

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Visi : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh,Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif			
Misi II : Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan			
Tujuan Kota	Sasaran Kota	Strategi Kota	Arah Kebijakan Kota
Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian dan Kebudayaan	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Penguatan Sistem Demand – Driven Ketanagakerjaan	1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal dengan Dunia Usaha di dukung perluasan akses Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja 2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Misi III : Ekonomi Inklusi Berbasis Potensi Lokal Daerah yang Mendukung Integrasi Ekonomi Digital			
Tujuan Kota	Sasaran Kota	Strategi Kota	Arah Kebijakan Kota
Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas dan Kolaborasi	Penguatan Indsutri Kecil Menengah (IKM) yang didukung Peningkatan Ekosistem Industrialisasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Namun sebelumnya perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan program-program tersebut mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Probolinggo wajib memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja daerah setiap tahun selama periode RPJMD 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis dan akuntabel.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

Selanjutnya sebelum merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo selama kurun waktu 2026-2030 dirumuskan teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengampu dua Urusan yaitu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Perindustrian .

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Tenaga Kerja yang berkompeten dan Pengembangan sektor industri berbasis potensi daerah, berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing serta Peningkatan Produktivitas Sektor Industri	1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
						2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Porsentase		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
						2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

						2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
						2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
						2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
						2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	
					2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri		Porsentase	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
				Jumlah IKM tersertifikasi	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

			IKM masuk ke e-commerce	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi promosi	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri dan pelaku IKM berbasis potensi lokal	Meningkatnya jumlah pelaku industri yang berdaya saing	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang	IKM Binaan	% pertumbuhan jumlah Industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

		Tumbuhnya produk industri yang inovatif, berstandar, dan berorientasi pasar	Jumlah IKM yang berdaya saing	Produk tersertifikasi	Nilai produksi sektor industri lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
						Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
						3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel		Nilai	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				3.31.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				3.31.01.2.06.0005	

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.1. Uraian Program

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Prohram adalah Penjabaran kegiatan Perangkat Daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi :

Dalam Rencana tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Rencanaan Tenaga Kerja

Indikator Outcame/Output : Prosentse Kabupaten /Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

2. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Indikator Outcame/Output : Prosentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Outcame/Output : Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan Dalam Negeri

4. Program Hubungan Industrial

Indikator Outcame/Output : Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja yang dialog sosial

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Outcame/Output : Prosentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator,Outcame/Output : Prosentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator,Outcame/Output : Prosentase izin Usaha Industri yang diterbitkan

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator, Outcame/Output : Tersedianya Informasi Industri secrfa lengkap, Akurat dan Terkini

4.2. Uraian Kegiatan

1. Program Rencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Renacana Kerja (RTK)

Indikator, outcame : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

2. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi

Indikator , outcame : Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan : Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota

Indikator, outcame : Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja

2. Kegiatan : Penedlolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator, outcame : Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja

4. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan : Pengelolaan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, outcame : Prosentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kinerja Bersama.

2. Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan didaerah Kabupaten/ Kota

Indikator, outcame : Prosentase Penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerha Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, outcome : Prosentase BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Indikator, outcome : Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai ketentuan

8. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, outcome : Prosentase BMD dalam kondisi baik

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan : Pentusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator , outcome : Prosentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Indikator : Prosentase Izin Usaha Industri (IUI), izin

Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan.

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI, IPUI,IUK dan IPKI Kewenangan.

Indikator, outcome : Prosentase Data Industri yang dikelola dengan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

1. Program Rencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (RTK)

Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

Sub Kegiatan : Rencana Tenaga Kderja Makro

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

2. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi

Indikator , outcome : Prosentase Pencari kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

1. Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Produktivitas dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan kalster Kompetensi

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi .

2. Sub. Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja.

Indikator : Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana Pelatihan vokasi

dan produktifitas pada tahun

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1. Kegiatan : Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
 - Indikator, outcome : Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Indikator, outcome : Jaminan Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas layanan ULD
 - b. Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja
 - Indikator, outcome : Jumlah tenaga kerja yang di berdayakan melalui Program perluasan kesempatan kerja
- 2. Kegiatan : Pengedlolaan Informasi Pasar Kerja
 - Indikator : Prosentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi pasar kerja
 - Sub. Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja
 - Indikator, outcome : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja

4. Program Hubungan Industrial

- 1. Kegiatan : Pengelolaan Peraturan Perusahaan b dan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Indikator, outcome : Prosentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kinerja Bersama.
- 2. Kegiatan : Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
 - Indikator, outcome : Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja
 - Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan

- Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- Indikator, outcome : Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala Upah, dan LKS Bilpartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan.
2. Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan disaerah kabupaten Kota
- Indikator, outcome : Prosentase Penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial
- Sub. Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di satu (1) Daerah Kab/Kota
- Indikator, outcome : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80 %

 - a. Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Capaian Kinerja dan ikhtisars Realisasi Kinerja

Indikator, outcome : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, outcome : Prosentase Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan

 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan

- Indikator, outcome : Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Daerah
 - Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
 - Indikator, outcome : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Indikator, outcome : Prosentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan.
 - Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Indikator, outcome : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan
 - Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai
 - Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Indikator, outcome : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan.
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Indikator, outcome : Jumlah paket barang cetakan dan

- penggandaan yang disediakan
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 Indikator, outcome : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.
 - d. Sub Kegiatan : fasilitasi Kunjungan Tamu
 Indikator, outcome : Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu.
 - e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 Indikator, outcome : Jumlah laporan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f. Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
 Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Indikator, outcome : Prosentase BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan
 Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin
 Indikator, outcome : Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 Indikator, outcome : Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai Ketentuan
 a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air
 Indikator, outcome : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air.

- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Indikator, outcome : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Indikator, outcome : Prosentase BMD dalam kondisi baik
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
 - Indikator, outcome : Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya.
 - b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Mesin
 - Indikator, outcome : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
 - c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - Indikator, outcome : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- Kegiatan : Pentusunan dan Evaluasi Rencana Prembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Indikator , outcome : Prosentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan
 - a. Sub Kegiatan : Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Indikator, outcome : Jumlah Dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi , sinkronisasi dan

	pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry.
c. Sub Kegiatan	: Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Industri dan peran serta masyarakat
Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan industry dan peran serta masyarakat.
d. Sub Kegiatan	: Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan industri
Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan industry.

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan	: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator, outcome	: Prosentase Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan.
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap perizinan berusaha sector Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator, outcome : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan penanaman modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

8. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI, IPU, IUK dan IPKI Kewenangan.

Indikator, outcome : Prosentase Data Industri yang dikelola dengan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

Sub Kegiatan : Fasilitas i Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	0	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1	100.000.000	0	0	0	0	0	0		0	
2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1	100.000.000	0	0	0	0	0	0		0	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	89,28	90,3	308.350.167	90,6	316.921.501	90,9	323.529.659	91,2	330.322.993	91,5	337.114.534	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi		90,3	308.350.167	90,6	316.921.501	90,9	323.529.659	91,2	330.322.993	91,5	337.114.534	

2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		50	145.900.450	16	149.650.900	16	151.675.625	16	154.980.350	16	158.479.800	
2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		20	162.449.717	12	167.270.601	12	171.854.034	12	175.342.643	12	178.634.734	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	89,28	90,3	107.605.896	90,6	110.597.061	90,9	112.903.130	91,2	115.273.820	91,5	117.643.885	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja		90,3	107.605.896	90,6	110.597.061	90,9	112.903.130	93,3	115.273.820	93,3	117.643.885	
2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		50	28.000.000	50	28.500.000	16	29.000.000	50	29.500.000	50	30.000.000	
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20	39.605.896	20	42.097.061	12	43.903.130	20	45.773.820	20	47.643.885	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja		90,3	40.000.000	90,6	40.000.000	90,9	40.000.000	93,3	40.000.000	93,3	40.000.000	

2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		130	40.000.000	130,00	40.000.000	130	40.000.000	130	40.000.000	130	40.000.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	70	74	179.109.812	76	184.088.600	78	187.927.047	80	191.873.057	82	195.818.025	
		57	47		49		51		53		55		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		74	46.999.800	76	49.499.300	78	50.897.445	80	52.650.765	82	54.545.975	
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		74	46.999.800	76	49.499.300	78	50.897.445	80	52.650.765	82	54.545.975	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial		54	132.110.012	56	134,589.300	58	137.029.602	60	139.222.292	62	141.272.050	

2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		54	132.110.012	56	134,589.300	58	137.029.602	60	139.222.292	62	141.272.050	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	90	100	11.416.431.640	100	11.836.558.556	100	12.083.363.674	100	12.337.084.846	100	12.590.739.053	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		100	97.591.445	100	105.655.865	100	107.608.930	100	118.369.823	100	125.206.805	
3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	69.688.000	100	76.744.000	100	75.714.690	100	75.586.159	100	80.144.775	
3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10	37.144.000	10	42.500.000	10	43.894.240	10	42.783.664	10	45.062.030	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	10.144.643.958	100	10.461.310.685	100	10.620.794.648	100	10.851.128.951	100	10.969.451.569	
3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48	10.144.643.958	48	10.461.310.685	48	10.458.015.878	48	10.684.172.304	48	10.795.799.257	
3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	129.441.000	12	135.635.000	12	147.015.820	12	155.117.402	12	170.629.142	
3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12	13.895.000	12	18.325.000	12	15.762.950	12	11.839.245	12	13.023.170	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	15.994.926	100	20.450.675	100	10.250.000	100	10.250.000	100	10.250.000	
3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	15.994.926	12	20.450.675	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	28.050.000	100	32.200.000	100	34.750.000	100	32.050.000	100	32.050.000	
3.31.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	8.050.000	12	9.700.000	12	12.250.000	12	12.050.000	12	12.050.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100	314.741.895	100	365.620.785	100	337.777.233	100	336.103.209	100	384.103.209	
3.31.01.2.06.0002 Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	51.375.500	4	58.735.000	4	50.476.500	4	50.476.500	4	55.475.500	

Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	20.272.500	2	25.722.800	2	20.272.500	2	25.272.500	2	30.209.500	
3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	6.120.000	12	11.750.000	12	6.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		4	12.000.000	4	17.000.000	4	22.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	
3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	177.625.895	12	189.562.985	12	185.798.233	12	191.124.209	12	220.124.209	
3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	9.150.000	12	18.550.000	12	12.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	
3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	38.129.000	12	44.300.000	12	36.230.000	12	35.230.000	12	37.230.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	87.399.000	100	92.845.000	100	175.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	
3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	87.399.000	35	92.845.000	35	175.000.000	35	170.000.000	35	180.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	428.014.435	100	441.060.565	100	411.216.435	100	466.216.435	100	469.216.435	

3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	135.889.000	12	144.675.000	12	135.990.000	12	135.990.000	12	138.990.000	
3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	292.125.435	12	296.385.565	12	290.226.435	12	330.226.435	12	330.226.435	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100	290.764.426	100	303.826.846	100	358.966.428	100	350.966.428	100	418.525.035	
3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19	117.154.426	19	122.500.846	19	110.356.428	19	108.356.428	19	113.356.428	
3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40	39.000.0000	40	42.000.000	40	53.000.000	40	50.000.000	40	55.000.000	
3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	134.610.000	1	139.326.000	2	195.610.000	2	192.610.000	2	250.168.607	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	83	84	338.437.024	84,5	347.844.695	85	355.097.635	85,5	362.553.820	86	370.008.037	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	83	84	338.437.024	84,5	347.844.695	85	355.097.635	85,5	362.553.820	86	370.008.037	

3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	5	82.350.634	5	84.650.968	6	86.335.675	6	87.335.427	7	88.950.695	
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	9	227.500.806	10	231.235.950	11	234.665.655	12	237.367.388	13	240.356.347	
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	2	22.750.409	2	24.550.277	2	26.057.605	2	28.000.355	2	29.450.645	
3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	5.835.175	1	7.407.500	1	8.038.700	1	9.850.650	1	11.250.350	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	82	83	13.777,699	83,5	14.160.683	84	14.455.949	84,5	14.759.489	85	15.062.948	
<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	82	83	13.777,699	83,5	14.160.683	84	14.455.949	84,5	14.759.489	85	15.062.948	

3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	82	83	13.777,699	83,5	14.160.683	84	14.455.949	84,5	14.759.489	85	15.062.948	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	82	83	21.410.269	83,5	22.005.419	84	22.464.256	84,5	22.935.950	85	23.403.520	
<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	82	83	21.410.269	83,5	22.005.419	84	22.464.256	84,5	22.935.950	85	23.403.520	
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	82	83	23.403.520	83,5	22.005.419	84	22.464.256	84,5	22.935.950	85	23.403.520	

JUMLAH			11.064.819.469		12.061.301.416		13.267.431.558		14.594.174.714		16.053.592.185	
--------	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. Sasaran tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi dan arah kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan maka dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	

4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

			3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
			3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	

7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

Selain program prioritas penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi antara lain:

Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,01	71,05	71,09	71,13	71,17	71,21	
2	Cakupan Kep[esertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	62,57	64,45	66,32	68,19	70,06	71,93	
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	
4	Nilai SAKIP (Sistem Aun[t]abilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.	%	76,69	76,75	76,80	76,85	76,90	76,95	

Sejalan dengan target IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , berikut di uraikan berkaitan dengan indikator kinerja kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan target kinerja tahun 2025 — 2029

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Tenaga Kerja								
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,89	61,47	62,05	62,63	63,21	63,79	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,01	71,05	71,09	71,13	71,17	71,21	
3	Prosentase Pencari Kerja yang di tempatkan pada sektor Formal dan Informal	%	90	90,3	90,6	90,9	91,2	91,5	
4	Prosentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan Kerja	%	72	74	76	78	80	82	
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	62,57	64,45	66,32	68,19	70,06	71,93	
	Urusan Perindustrian								

1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	
---	--	---	------	------	------	------	------	------	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan komprehensif untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, serta menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan penganggaran yang terarah dan terukur

Untuk itu sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah - kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo .
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sumber daya aparatur dan pembangunan bidang fisik serta kemasyarakatan, terikat untuk menjadikan Renstra ini sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

5. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
6. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2029.
7. Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja , maka proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029, harus mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029.

Akhir kata, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan Kota Probolinggo.

